



Evaluasi Kebijakan Pendidikan dalam Rangka Penguatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Mamberamo Tengah: Kajian Berbasis Enam Kriteria William N. Dunn

Bonavantura Gusto Nong Dion Ameng, Akbar Silo, Hiskia C. M. Sapioper, Beatus Tambaip

Universitas Cenderawasih, Indonesia

Email: a.bovanda@gmail.com, assilo708@gmail.com, sapioperh@gmail.com, beatus229@gmail.com

Abstract

The quality of basic education cannot be separated from the capacity and competence of teachers who are on duty at the forefront of learning. However, the reality on the ground shows that areas that are categorized as disadvantaged, frontier, and outermost (3T) areas, including Central Mamberamo Regency in Papua Mountainous Province, still face teacher competency problems that are far from being resolved. This study was conducted to evaluate education policies in an effort to strengthen the competence of elementary school teachers in Central Mamberamo Regency through the lens of six policy evaluation criteria proposed by William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The research design used is an evaluative case study with a descriptive qualitative approach. Data mining was carried out through in-depth interviews with 24 informants from seven stakeholder categories, observations in five schools, and document search, all of which were analyzed using the Miles and Huberman interactive model accompanied by triangulation of sources. The findings showed that of the total 254 teachers in 35 elementary schools, only 60.2% met the S-1 qualification and only 11.8% had an educator certificate, both well below the national average. When evaluated using all six Dunn criteria, the average score obtained was only 2.33 on a scale of 5, in the category of poor. The unavailability of electricity and internet access in almost all elementary schools turns out to play a role as a structural moderation variable that significantly weakens the effectiveness of various policy instruments that rely on the assumption of digital infrastructure. As a theoretical contribution, this study proposes three new propositions, namely the concept of policy design gap, educational deprivation cycle, and multi-stakeholder partnership ecosystem model as an alternative to education governance in 3T areas.

Keywords: policy evaluation, elementary school teacher competency, mamberamo tengah, william n. dunn, 3t area

Abstrak

Mutu pendidikan dasar tidak dapat dilepaskan dari kapasitas dan kompetensi guru yang bertugas di garis depan pembelajaran. Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa wilayah-wilayah yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua Pegunungan, masih menghadapi persoalan kompetensi guru yang jauh dari terselesaikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan dalam upaya penguatan kompetensi guru SD di Kabupaten Mamberamo Tengah melalui lensa enam kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan William N. Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus evaluatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penggalan data dilakukan lewat wawancara mendalam terhadap 24 informan dari tujuh kategori pemangku kepentingan, observasi di lima sekolah, serta penelusuran dokumen, yang seluruhnya dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman disertai triangulasi sumber. Temuan menunjukkan bahwa dari keseluruhan 254 guru di 35 SD, baru 60,2% yang memenuhi kualifikasi S-1 dan hanya 11,8% yang telah memiliki sertifikat pendidik, keduanya jauh di bawah angka rata-rata nasional. Ketika dievaluasi menggunakan keenam kriteria Dunn, skor rata-rata yang diperoleh hanya 2,33 dari skala 5, masuk kategori kurang. Tidak tersedianya listrik dan akses internet di hampir seluruh SD ternyata berperan sebagai variabel moderasi struktural yang secara nyata melemahkan efektivitas berbagai instrumen kebijakan yang bertumpu pada asumsi infrastruktur digital. Sebagai kontribusi teoretis, studi ini mengajukan tiga proposisi baru, yaitu konsep policy design gap, educational deprivation cycle, dan model ekosistem kemitraan multipihak sebagai alternatif tata kelola pendidikan di daerah 3T.

PENDAHULUAN

Dalam berbagai kajian kebijakan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun global, kompetensi guru secara konsisten ditempatkan sebagai variabel paling berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di jenjang pendidikan dasar (Daga, 2022; Syawitri, 2025; Yulastri et al., 2025). Di Indonesia, hal ini telah direspons melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang secara tegas mewajibkan setiap guru untuk memiliki kualifikasi akademik paling rendah Strata Satu (S-1) dan memperoleh sertifikat pendidik sebagai penanda profesionalisme. Sayangnya, kesenjangan antara apa yang dikehendaki regulasi dan apa yang terjadi di lapangan kian kentara ketika perhatian difokuskan pada wilayah-wilayah 3T sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020. Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua Pegunungan adalah salah satu potret nyata dari ketimpangan tersebut. Letak geografisnya yang hanya bisa dijangkau lewat penerbangan perintis ke sebagian besar distriknya melahirkan hambatan struktural yang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan menduplikasi kebijakan nasional yang bersifat seragam dan generik.

Evaluasi kebijakan, dalam kerangka analisis kebijakan publik, bukan sekadar penilaian akhir terhadap keberhasilan suatu program, melainkan sebuah proses sistematis untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut (Dilapanga et al., 2022; Muhiddin, 2017; Subianto, 2020; Taali et al., 2024). William N. Dunn (2003) menawarkan kerangka evaluasi multikriteria yang mencakup enam dimensi penilaian: efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan (appropriateness). Kelebihan kerangka ini dibandingkan pendekatan evaluasi tunggal terletak pada kemampuannya menangkap kerumitan implementasi kebijakan di wilayah dengan keterbatasan berlapis, di mana ukuran keberhasilan numerik semata jauh dari memadai. Lebih jauh, Dunn (2003) mengingatkan bahwa evaluasi yang baik bukan hanya bertanya apakah tujuan telah tercapai, tetapi juga mempertanyakan apakah tujuan itu sendiri masih relevan dan apakah manfaatnya terdistribusi secara adil kepada mereka yang paling membutuhkan.

Sebagian besar studi yang mengkaji kondisi pendidikan di Papua selama ini memusatkan perhatian pada evaluasi kebijakan Dana Otonomi Khusus secara makro (Afriansyah, 2022; Rahman, 2023; Korain et al., 2020), tanpa menelusuri secara spesifik sejauh mana kebijakan tersebut berhasil meningkatkan kompetensi guru pada keempat dimensi standar nasional. Nugroho (2017) memang pernah melakukan pemetaan kompetensi guru SD di kawasan terpencil Kalimantan Tengah dan mendapati skor kompetensi sebesar 71,12% dari standar, namun karakteristik geografis, sosial-budaya, dan kelembagaan Mamberamo Tengah yang jauh lebih ekstrem menjadikan temuan tersebut tidak serta-merta dapat dibandingkan. Di sisi lain, Alfasisromarakap et al. (2021) mengidentifikasi berbagai hambatan struktural dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di Biak Numfor, sedangkan Sanoto et al. (2021) meneliti keterkaitan supervisi akademik dengan kompetensi guru di wilayah 3T Bengkayang. Dari semua penelitian yang telah ada, celah yang paling mencolok adalah belum adanya evaluasi kebijakan yang menggunakan kerangka Dunn secara utuh di kawasan Papua Pegunungan, khususnya di wilayah dengan hambatan akses yang paling berat di Indonesia.

Berangkat dari celah itulah penelitian ini mengambil posisi, yakni menghadirkan evaluasi yang bertumpu pada data empiris dan bukti lapangan terhadap kebijakan penguatan kompetensi guru SD di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan menggunakan keenam kriteria Dunn sebagai kerangka analisis. Tiga tujuan yang hendak dicapai meliputi: (1) memetakan kondisi kualifikasi akademik dan kompetensi guru SD di Mamberamo Tengah; (2) mengurai faktor-faktor yang menjadi pendukung sekaligus penghambat implementasi kebijakan; serta (3) menilai seberapa jauh program-program penguatan kompetensi yang telah berjalan memberikan hasil yang bermakna. Secara teoretis, penelitian ini menyumbangkan cara baru dalam mengoperasionalkan kerangka Dunn di konteks 3T pegunungan sekaligus merumuskan proposisi-proposisi orisinal tentang policy design gap dan model kemitraan multipihak sebagai pendekatan tata kelola pendidikan daerah tertinggal.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus evaluatif, menerapkan model evaluasi cepat (rapid evaluation) sebagai strategi penelitian. Pilihan atas pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena implementasi kebijakan di wilayah 3T sarat dengan nuansa geografis, sosial-budaya, dan kelembagaan yang tidak dapat diringkas semata-mata dalam angka (Saleh, 2023). Sebagai instrumen analisis, penelitian ini mengadopsi kerangka evaluasi William N. Dunn (2003) yang keenam kriterianya dioperasionalkan ke dalam skala evaluatif numerik 1 sampai 5, di mana setiap nilai merepresentasikan persentase capaian empiris terhadap standar normatif yang diatur dalam berbagai regulasi, antara lain UU No. 14 Tahun 2005, Permendiknas No. 16 Tahun 2007, PP No. 19 Tahun 2017, dan Permendikbudristek No. 54 Tahun 2022.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dengan cakupan seluruh 35 SD yang tersebar di 5 distrik dan menampung total 254 guru sebagai populasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga jalur sekaligus sebagai bentuk triangulasi. Jalur pertama adalah wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur yang menjangkau 24 informan dari tujuh kategori berbeda, yaitu pejabat Dinas Pendidikan (DP-01), pejabat BKPSDM (BK-01), kepala sekolah (KS-01 dan KS-02), guru (GR-01 hingga GR-07), orang tua/komite sekolah (OT-01 hingga OT-03), serta perwakilan lembaga mitra (MT-03), yang semuanya ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Jalur kedua adalah observasi terbatas di lima satuan pendidikan yang dipilih secara purposif agar mewakili ragam kondisi antarwilayah. Jalur ketiga adalah penelusuran dokumen, mencakup data Dapodik Semester I 2025, register SP2D Dinas Pendidikan 2020-2024, laporan program UNICEF dan Yayasan Nusantara Sejati (YNS), serta berbagai regulasi berjenjang dari pusat hingga daerah. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2019) yang melewati tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kualifikasi, Kompetensi, dan Program Penguatan

Rekam data Dapodik Semester I 2025 mengungkapkan gambaran yang mengkhawatirkan: dari 254 guru yang bertugas di 35 SD, baru 153 orang atau 60,2% yang memenuhi standar kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV sebagaimana dipersyaratkan Pasal

9 UU 14/2005. Angka ini menempatkan Mamberamo Tengah pada posisi 37,1 poin di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai 97,33%. Kondisi sertifikasi bahkan lebih memprihatinkan: hanya 30 guru (11,8%) yang telah bersertifikat pendidik, sementara 224 guru atau 88,2% sisanya masih belum tersertifikasi. Fakta ini sejalan dengan keterbatasan mendasar bahwa program PPG Dalam Jabatan yang diselenggarakan secara daring praktis tidak dapat menjangkau wilayah yang sama sekali tidak memiliki akses internet. Bila ditelaah per distrik, kesenjangan semakin mencolok: Distrik Kobakma berada di puncak dengan 68,3%, sementara Distrik Megambilis yang aksesnya bergantung pada pesawat perintis tercatat hanya 45,0%, dengan seluruh tiga SD-nya terakreditasi C. Selisih 23,3 poin antara distrik terbaik dan terburuk ini menggambarkan apa yang dalam studi ini dinamakan sebagai *educational deprivation cycle*: keterbatasan akses melahirkan defisit kualitas guru, yang pada akhirnya menekan kualitas pembelajaran dan menekan akreditasi sekolah dalam lingkaran yang saling mengokohkan. Dari sisi pembiayaan, total realisasi anggaran SP2D selama 2020-2024 mencapai Rp 45,26 miliar, tetapi 58,2% di antaranya atau Rp 26,32 miliar habis terserap untuk pengadaan guru kontrak. Adapun yang benar-benar dialokasikan untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi hanya 18,8% atau Rp 8,50 miliar, tanpa adanya satu pun pos anggaran yang secara khusus dirancang untuk mendukung keterlibatan guru dalam program PPG Dalam Jabatan.

Hasil Evaluasi Enam Kriteria Dunn

Penilaian terhadap kebijakan menggunakan keenam kriteria Dunn (2003) menghasilkan skor kumulatif 14 dari 30, atau rata-rata 2,33 dari 5, yang berarti kebijakan ini hanya masuk kategori kurang. Pada dimensi efektivitas, skor yang diperoleh adalah 2/5 mengingat capaian kualifikasi S-1 baru 60,2% dan sertifikasi hanya 11,8%, keduanya masih jauh dari target 100% yang ditetapkan regulasi. Di tengah gambaran suram itu, satu catatan positif datang dari program literasi YNS-UNICEF yang cakupannya tumbuh dari 3 SD pada 2019 menjadi 20 SD pada 2024, disertai peningkatan kemampuan membaca siswa yang terukur melalui Early Grade Reading Assessment (EGRA). Dari sisi efisiensi, skor 2/5 mencerminkan ketidakseimbangan alokasi antara belanja pengadaan guru kontrak (58,2%) dan belanja pengembangan kompetensi (18,8%), dengan biaya per guru yang hanya Rp 6,69 juta per tahun, tidak cukup bahkan untuk sekadar ongkos perjalanan pulang-pergi ke LPTK di Jayapura. Kecukupan juga bernilai 2/5: jika hanya sekitar 10 guru yang dapat mengikuti PPG setiap tahunnya dari 224 yang membutuhkan sertifikasi, maka target 100% baru bisa terpenuhi setelah lebih dari dua dekade. Pemerataan turut meraih skor 2/5, karena ironisnya wilayah yang paling membutuhkan bantuan justru mendapat jatah perhatian paling kecil. Sedikit lebih baik, responsivitas mendapat skor 3/5 berkat sejumlah langkah adaptif yang dilakukan, seperti pemanfaatan Dana Otsus Spesifik untuk program literasi berbasis EGRA, pengembangan kurikulum muatan lokal Papua, penerapan metode GASING yang tidak bergantung teknologi, dan prakarsa Raperda Literasi Pendidikan 2024. Ketepatan juga bernilai 3/5: secara normatif kebijakan ini memang selaras dengan regulasi dari UU 14/2005 hingga Permendikdasmen 4/2025, namun keselarasan normatif itu tidak otomatis menghasilkan dampak bermakna selama hambatan infrastruktur lintas sektoral belum tertangani.

Apabila berbagai temuan penelitian ini dicermati secara keseluruhan, satu benang merah yang menonjol adalah bahwa persoalan yang dihadapi bukan semata-mata soal lemahnya pelaksanaan kebijakan, melainkan lebih dalam dari itu: terdapat *policy design gap*, yakni jurang antara asumsi-asumsi infrastruktur yang tertanam dalam desain kebijakan

nasional dan realitas yang ada di lapangan. Dunn (2003) sendiri membedakan dua jenis kegagalan ini: *implementation gap*, yang terjadi ketika kebijakan yang sudah dirancang dengan baik gagal dalam pelaksanaannya, dan *design gap*, yang terjadi ketika desain kebijakan itu sendiri berpijak pada prasyarat yang tidak ada. Program PPG Dalam Jabatan adalah contoh gamblang dari yang terakhir: ia mensyaratkan koneksi internet yang stabil, sementara seluruh 35 SD di Mamberamo Tengah tidak memiliki akses internet, bahkan sebagian besar di antaranya belum terjangkau jaringan listrik PLN sekalipun. Dari sinilah muncul kesimpulan bahwa kebijakan yang tepat secara normatif belum tentu tepat secara operasional di konteks 3T pegunungan, dan yang dibutuhkan bukanlah perbaikan implementasi biasa, melainkan reformasi mendasar pada tataran desain kebijakan itu sendiri. Kesimpulan ini memperdalam dan memperluas gagasan Winarno (2016) yang menekankan pentingnya kepekaan kontekstual dalam setiap proses evaluasi kebijakan publik.

Penempatan temuan ini dalam lanskap riset yang sudah ada semakin mempertegas relevansinya. Nugroho (2017) pernah melaporkan skor kompetensi guru SD terpencil di Kalimantan Tengah sebesar 71,12%, yang secara absolut lebih tinggi dari kondisi di Mamberamo Tengah. Namun perbedaan ini tidak bisa semata-mata dibaca sebagai kualitas intervensi yang lebih baik di sana, melainkan lebih mencerminkan perbedaan kondisi prasyarat yang mendasar: Kabupaten Gunung Mas memiliki akses darat yang jauh lebih mudah dibandingkan Mamberamo Tengah yang sebagian distriknya hanya terjangkau lewat jalur udara perintis. Rahman (2023) menyimpulkan bahwa besarnya alokasi Dana Otsus Papua belum berbanding lurus dengan perbaikan di sektor pendidikan, dan temuan itu menemukan konfirmasinya dalam penelitian ini, di mana Dana Otsus Spesifik yang tumbuh signifikan pada 2023-2024 ternyata 55,9%-nya mengalir ke belanja rutin guru kontrak, bukan ke program kompetensi. Alfasisromarakap et al. (2021) memang sudah menyoroti peran keterbatasan infrastruktur dan transportasi sebagai hambatan di Biak Numfor, namun tingkat ekstremitas hambatan di Mamberamo Tengah melampaui konteks tersebut. Adapun temuan Suryaningrum dan Sumarah (2023) tentang sulitnya implementasi Kurikulum Merdeka di daerah 3T akibat minimnya pelatihan langsung mendapat penegasan dari data lapangan penelitian ini. Yang menarik adalah justru program YNS-UNICEF yang mendapat skor efektivitas 4/5 dari penilaian mitra, jauh melampaui skor 2/5 yang diperoleh kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa keterpencilan wilayah tidak selalu menjadi penghalang keberhasilan program, asalkan program tersebut didesain secara kontekstual dengan pendampingan intensif berbasis klaster.

Pada tataran teoretis, penelitian ini merumuskan tiga proposisi baru yang memperluas cakrawala kerangka evaluasi Dunn (2003), khususnya dalam konteks daerah tertinggal. Proposisi pertama menyatakan bahwa kondisi aksesibilitas geografis dan ketersediaan infrastruktur dasar berfungsi sebagai variabel moderasi struktural yang secara bersamaan menetapkan batas atas (*ceiling*) bagi capaian seluruh enam kriteria Dunn, sehingga penilaian tidak dapat dilakukan atas masing-masing kriteria secara terpisah di wilayah dengan hambatan akses yang ekstrem. Proposisi kedua menandakan bahwa ketika kebijakan dirancang di atas asumsi infrastruktur yang tidak tersedia, problem yang muncul adalah *policy design gap*, bukan sekadar kegagalan implementasi, sehingga solusinya harus bersifat reformasi desain dari hulu. Proposisi ketiga menegaskan bahwa ekosistem kemitraan multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, UNICEF, Yayasan Nusantara Sejati, dan Surya Institute terbukti

menghasilkan intervensi yang lebih efektif sekaligus lebih efisien dibanding kebijakan yang dikelola pemerintah sendiri, dan karena itu layak dijadikan model tata kelola pendidikan untuk daerah 3T di Indonesia. Pada tataran praktis, temuan ini memberi isyarat kuat tentang perlunya kebijakan asimetris (*asymmetric policy*) yang dirancang secara eksplisit untuk konteks pegunungan 3T: mendahulukan elektrifikasi satuan pendidikan sebagai prasyarat utama, menyelenggarakan PPG berbasis blok intensif secara luring, membuka program beasiswa S-1 secara masif melalui UNCEN dengan skema kelas satelit, serta melembagakan Kelompok Kerja Guru (KKG) di kelima distrik sebagai wahana pengembangan profesional yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa kebijakan penguatan kompetensi guru SD di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, berada pada kategori kurang, dengan skor rata-rata 2,33 dari 5 berdasarkan enam kriteria Dunn. Kegagalan yang terjadi bukan semata-mata soal lemahnya pelaksanaan, melainkan lebih mencerminkan *policy design gap* yang bersifat fundamental, yaitu kebijakan nasional yang dibangun di atas asumsi infrastruktur digital yang faktanya tidak tersedia di 35 SD Mamberamo Tengah. Pada dimensi teoritis, penelitian ini menyumbangkan tiga konsep orisinal, yakni variabel moderasi struktural, *policy design gap*, dan *educational deprivation cycle*, sebagai proposisi baru yang memperkaya kerangka evaluasi kebijakan pendidikan di daerah 3T. Pada dimensi praktis, dirumuskan rekomendasi kebijakan asimetris yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat. Ke depan, sangat disarankan agar kajian serupa dilanjutkan ke kabupaten-kabupaten lain di Papua Pegunungan dengan menggabungkan evaluasi kualitatif berbasis Dunn dan analisis kuantitatif longitudinal dalam desain *mixed methods*, sehingga dasar bukti bagi reformasi kebijakan pendidikan 3T di Indonesia menjadi semakin kokoh dan komprehensif.

REFERENSI

- Afriansyah, A. (2022). Refleksi dua puluh tahun pembangunan pendidikan di Tanah Papua (2001–2021). *Masyarakat Indonesia*, 48(1), 1–22.
- Alfasisromarakap, L., Tamaela, S., & Manggabarani, A. (2021). Hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua di era otonomi khusus Papua. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 4(2), 312–321.
- Daga, A. T. (2022). Penguatan peran guru dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar di sekolah dasar. *ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 6(1), 1–24.
- Dilapanga, A. R., Rantung, M. I. R., & SH, M. A. P. (2022). *Monitoring & evaluasi kebijakan publik*. Deepublish.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Edisi ke-2). Gadjah Mada University Press.
- Kemendikbudristek. (2024). *Statistik pendidikan nasional 2023/2024*. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Korain, Y., Kaunang, F., & Egetan, M. (2020). Implementasi kebijakan dana otsus bidang pendidikan di Kota Sorong. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(4), 45–58.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Muhiddin, A. (2017). *Evaluasi kebijakan publik (Studi kesiapan desa menerima dana desa di Kabupaten Gowa)*. Pascasarjana.
- Nugroho, S. (2017). Pemetaan kompetensi guru SD di daerah terpencil Kabupaten Gunung Mas. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 3(1), 88–102.
- Rahman, F. (2023). Analisis dampak otonomi khusus dalam upaya optimalisasi sektor pendidikan di Provinsi Papua. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 23–38.
- Saleh, S. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Sanoto, H., Arfandi, A., & Nurmasari, L. (2021). Pengaruh supervisi akademik terhadap peningkatan kompetensi guru di daerah 3T Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 141–157.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. Brilliant.
- Suryaningrum, C., & Sumarah, I. (2023). Tantangan implementasi kurikulum Merdeka di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 30(1), 1–14.
- Syawitri, D. (2025). Penguatan kompetensi profesional guru sekolah dasar di abad 21. *Jurnal Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Usia Dini*, 2(1), 13–18.
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori dan model evaluasi kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS.
- Yulastri, W., Yeni, Z., Yessari, M., Afia, B., Putri, Y. R., Amizi, D. S., & Nurazila, A. (2025). Analisis kebijakan evaluasi dan pembelajaran dan inovasi strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(2), 290–300.